

## RINGKASAN

Tindak pidana korupsi saat ini sudah terjadi pada struktur pemerintahan terbawah yaitu desa, di mana desa diberikan kewenangan yang besar untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan serta untuk pemberdayaan kehidupan masyarakat pedesaan. Tindakan Korupsi di Desa dilakukan oleh para oknum yang melakukan Pengelolaan Keuangan Desa, yakni Perangkat Desa sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan. Penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi harus segera diwujudkan agar berjalan secara efektif sebagai upaya preventif dan represif. Upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling bersinergi yang jika diibaratkan seperti 2 (dua) sisi dalam 1 (satu) mata uang. Penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas, mengingat kedua instansi tersebut pernah melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa dengan kewenangannya masing-masing.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa upaya dan efektivitas yang dihadapi dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan perangkat desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan tipe penelitian kualitatif yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dan tabel-tabel, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif dan diuji dengan teori penegakkan hukum (Jimly Asshidqie), teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman), dan teori efektivitas hukum (Donald Black).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas data yang diperoleh dalam penelitian, dapat disimpulkan yakni Inspektorat melakukan penindakan beberapa kepala desa dan/atau perangkat desa secara administratif, dan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya preventif yaitu melalui penguatan fungsi pengawasan formal dan non formal dengan menarik peran serta masyarakat dalam pengawasan. Sementara Kejaksaan Negeri Purwokerto melakukan tindak lanjut atas laporan informasi/pengaduan praktek Korupsi yang terjadi, membudayakan pola kerja cepat, tepat, dan tuntas dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Penegakkan hukum yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto telah efektif menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, yakni dengan kerja sama penanganan perkara oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat, dan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi berupa pelanggaran administrasi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto kepada Inspektorat sehingga dapat menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Perangkat Desa baik melalui sistem peradilan pidana maupun melalui penyelesaian secara administrative di Inspektorat.

Kata Kunci : Korupsi, Efektivitas, Penegakkan Hukum.

## SUMMARY

*Corruption crimes are currently occurring at the lowest level of government structure, namely villages, where villages are given great authority to organize and implement development and to empower the lives of rural communities. Corruption in the village is carried out by individuals who carry out village financial management, namely village apparatus, as part of government administration. Corruption crime law enforcement must be realized immediately so that it can run effectively as a preventive and repressive effort. These efforts must be carried out well and be able to synergize with each other, which can be compared to two sides of one coin. The author conducted research at the Purwokerto District Prosecutor's Office and at the Banyumas Regency Regional Inspectorate, considering that both agencies had carried out law enforcement against criminal acts of corruption committed by village officials with their respective authorities.*

*The purpose of this research is to analyze the efforts and effectiveness faced in law enforcement for criminal acts of corruption carried out by village officials by the Banyumas Regency Regional Inspectorate and the Purwokerto District Prosecutor's Office. This research uses a sociological juridical approach with a qualitative research type carried out at the Banyumas Regency Regional Inspectorate and the Purwokerto District Prosecutor's Office. The data used is primary data obtained from interviews with sources and secondary data obtained from a literature study. The data is presented in descriptive narrative form and tables, then analyzed using qualitative methods and tested using law enforcement theory (Jimly Asshidqie), legal system theory (Lawrence M. Friedman), and legal effectiveness theory (Donald Black).*

*Based on the results of the research and discussion of the data obtained in the research, it can be concluded that the Inspectorate is taking administrative action against several village heads and/or village officials and continues to carry out guidance and supervision as a preventive measure, namely by strengthening formal and non-formal supervision functions by taking on the role of the community under supervision. Meanwhile, the Purwokerto District Prosecutor's Office is following up on information reports and complaints about corruption practices that occur, cultivating a fast, precise, and complete work pattern in handling criminal acts of corruption.*

*Law enforcement carried out by the Banyumas Regency Regional Inspectorate and the Purwokerto District Prosecutor's Office has been effective in resolving cases of criminal acts of corruption committed by village officials, namely by collaborating in handling cases by the Purwokerto District Prosecutor's Office in calculating State Losses carried out by the Inspectorate, and delegating cases of criminal acts of corruption in the form of administrative violations by the Purwokerto District Prosecutor's Office to the Inspectorate so that they can resolve cases of criminal acts of corruption committed by Village Officials either through the criminal justice system or through administrative settlement in Inspectorate.*

*Keywords : Corruption, Effectiveness, Law Enforcement.*